

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Besarnya jumlah penduduk disertai laju pertumbuhan yang cepat dengan kualitas rendah, tentu akan mempersulit tercapainya tujuan pembangunan dan dapat menimbulkan masalah kependudukan. Hal inilah yang menjadi masalah besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sensus penduduk tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 275.773,8 juta jiwa dan ditahun 2023 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 278.696,2 juta jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya.¹ Pertumbuhan populasi yang signifikan ini menekankan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sebagai upaya strategis untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membantu pasangan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak yang dapat berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan stabilisasi populasi. Dengan perencanaan keluarga yang lebih baik, program ini juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja dapat dialokasikan lebih efektif bagi seluruh penduduk. Namun, dengan laju pertumbuhan yang tetap tinggi, tantangan kedepan adalah memastikan bahwa kesadaran dan partisipasi

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) terus ditingkatkan serta mengembangkan kebijakan yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat tidak menghambat kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya pada pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa pengendalian jumlah penduduk harus disesuaikan dengan kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan melalui upaya pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian serta pengarahan mobilitas penduduk.² Dengan demikian, jelas bahwa pengendalian penduduk merupakan hal yang wajib dilakukan. Tanpa pengendalian tersebut, akan terjadi ketidakseimbangan antara kemampuan lingkungan dalam menampung penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mengatur laju kelahiran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan

² Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

keluarga yang berkualitas. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan:

- a. Pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa;
- c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan
- d. Peremberdayaan ekonomi keluarga

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah.³ Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di tingkat daerah, sesuai dengan kebijakan nasional. BKKBN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. Tugas utama BKKBN adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia. BKKBN

³ Peraturan BKKBN No 3 Tahun 2020

memiliki tugas utama melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKKBN memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tersebut
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, pejabat fungsional penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. penyuluh Keluarga Berencana bertanggungjawab dalam sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Secara keseluruhan, wewenang mereka meliputi koordinasi, implementasi

dan pengawasan program-program Keluarga Berencana di wilayah kerja mereka.⁴ Hal ini mencakup penyampaian informasi tentang pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan manfaat program KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Balai Penyuluhan KB ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang aktif dalam membantu keluarga merencanakan jumlah anggota keluarga dan memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga mendapatkan akses kepada layanan kesehatan reproduksi yang baik.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 mencapai 516.518 jiwa dan meningkat menjadi 523.402 jiwa di tahun 2023. Sementara itu, jumlah penduduk keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tercatat sebanyak 5.640.629 jiwa dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 5.700.573 jiwa.⁵ Hal ini mencerminkan meskipun program Keluarga Berencana (KB) telah diupayakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tantangan untuk menstabilkan angka kelahiran masih tetap ada. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan ini berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.

⁴ Peraturan BKKBN No 10 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, pejabat fungsional penyuluhan Keluarga Berencana.

⁵ <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/754/1/-proyeksi-interm-2021-2023-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Tabel 1.1 jumlah PUS dan Peserta KB aktif Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan	Jumlah PUS (jiwa)		Jumlah KB aktif (jiwa)	
	2022	2023	2022	2023
Pancung Soal	3398	3665	2107	2597
Ranah Pesisir	4515	5276	2949	3780
Lengayang	5816	5757	4832	4017
Batang Kapas	3343	4594	2356	2922
IV Jurai	5885	5406	3150	3778
Bayang	4431	4855	2313	2725
Koto XI Tarusan	5016	5539	2792	3297
Sutera	5537	5435	2933	3559
Linggo Sari Baganti	5353	5598	3307	3777
Lunang	3718	3612	2632	2585
Basa Ampek Balai Tapan	2390	2347	1709	1854
IV Nagari Bayang Utara	946	928	513	559
Airpura	2692	2887	1977	2108
Ranah Ampek Hulu Tapan	2532	2506	1888	1928
Silaut	2702	2889	2038	2284

Sumber: DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB aktif di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dan 2023. Dapat dilihat bahwa jumlah kelompok sasaran peserta KB aktif Kabupaten Pesisir Selatan pada rentang tahun 2022 dan 2023 setelah dikalkulasikan yang paling tinggi berada di

Kecamatan Ranah Pesisir yang mana kenaikan ini cukup signifikan yaitu 831 jiwa. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Ranah Pesisir. kelompok sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Namun, tidak semua PUS mengikuti program KB aktif, sedangkan peserta KB aktif sudah pasti termasuk dalam kelompok Pasangan Usia Subur (PUS).

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) pada bagian keenam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 22, (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsinya sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan mengkoordinir pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.⁶

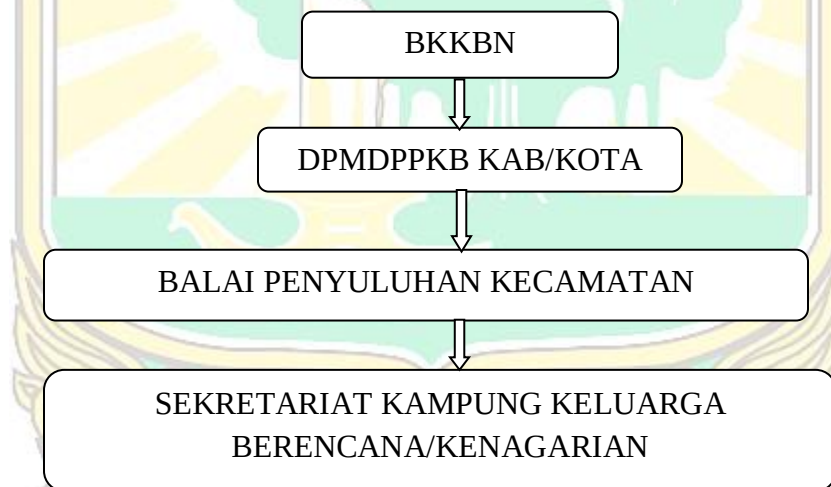
Meskipun Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan tersebut, program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Ranah Pesisir ini belum berjalan optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya kapasitas kader yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjalankan program ini dilapangan. Keterbatasan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya anggaran yang dialokasikan Nagari kepada kader. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kader KB tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif seperti melakukan penyuluhan, advokasi dan penggerakan dimasyarakat. Hal ini mengakibatkan program KB yang seharusnya mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung kapasitas serta kinerja para Kader KB, sehingga program yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Jumlah penduduk di kecamatan Ranah Pesisir menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kecamatan Ranah Pesisir mencapai 34.257 ribu jiwa, dan ditahun 2023 penduduk Kecamatan

⁶ Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Ranah Pesisir telah mencapai 34.682 ribu jiwa.⁷ Kenaikan jumlah penduduk di Kecamatan Ranah Pesisir dalam dua tahun terakhir dilihat dari peningkatan jumlah penduduk tersebut. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi menunjukkan bahwa upaya pengendalian kelahiran melalui program KB belum cukup efektif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini meliputi kurangnya edukasi yang memadai tentang pentingnya KB, keterbatasan akses terhadap alat kontrasepsi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Gambar 1.1
Koordinasi Provinsi Sampai Tingkat Kenagarian



Struktur pada gambar tersebut menggambarkan jalur koordinasi dari tingkat provinsi hingga tingkat kenagarian dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan

⁷ <https://pessselkab-bps.go.id/indicator/12/126/1/jumlah-penduduk.html>

lembaga pemerintah pusat yang bertanggungjawab atas kebijakan dan program, yang mana berperan sebagai penggagas dan pengawas utama kebijakan serta program Keluarga Berencana di Indonesia. Dibawah BKKBN, terdapat DPMDPPKB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) ditingkat kabupaten/kota. Dinas ini bertugas mengimplementasikan dan mengawasi program Keluarga Berencana diwilayahnya masing-masing serta mengkoordinasikan kegiatan ditingkat kecamatan. Selanjutnya ditingkat kecamatan terdapat Balai Penyuluhan yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penyuluhan untuk program Keluarga Berencana di tingkat kecamatan. Petugas dibalai penyuluhan memberikan edukasi, pelatihan, dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya KB serta memastikan program diterapkan dengan baik dilapangan. Kemudian ditingkat paling bawah adalah Sekretariat Kampung Keluarga Berencana Kenagarian yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program KB ditingkat lokal. Mereka memastikan bahwa setiap keluarga didesa mendapat akses dan pemahaman yang cukup mengenai program KB. Petugas disini bekerja langsung dengan masyarakat untuk memberikan penyuluhan, distribusi alat kontrasepsi dan layanan KB lainnya.

Setiap tingkat koordinasi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa program KB dapat diterapkan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kebijakan ditingkat nasional hingga implementasi ditingkat desa. Hal ini memungkinkan program KB dapat berjalan dengan baik dan

berkontribusi pada pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

“jumlah angka kelahiran di kecamatan ranah pesisir tercatat sebanyak 420 jiwa di tahun 2022 dan meningkat ditahun 2023 sebanyak 475 jiwa” wawancara dengan staf Balai Penyuluh KB Kec. Ranah Pesisir)

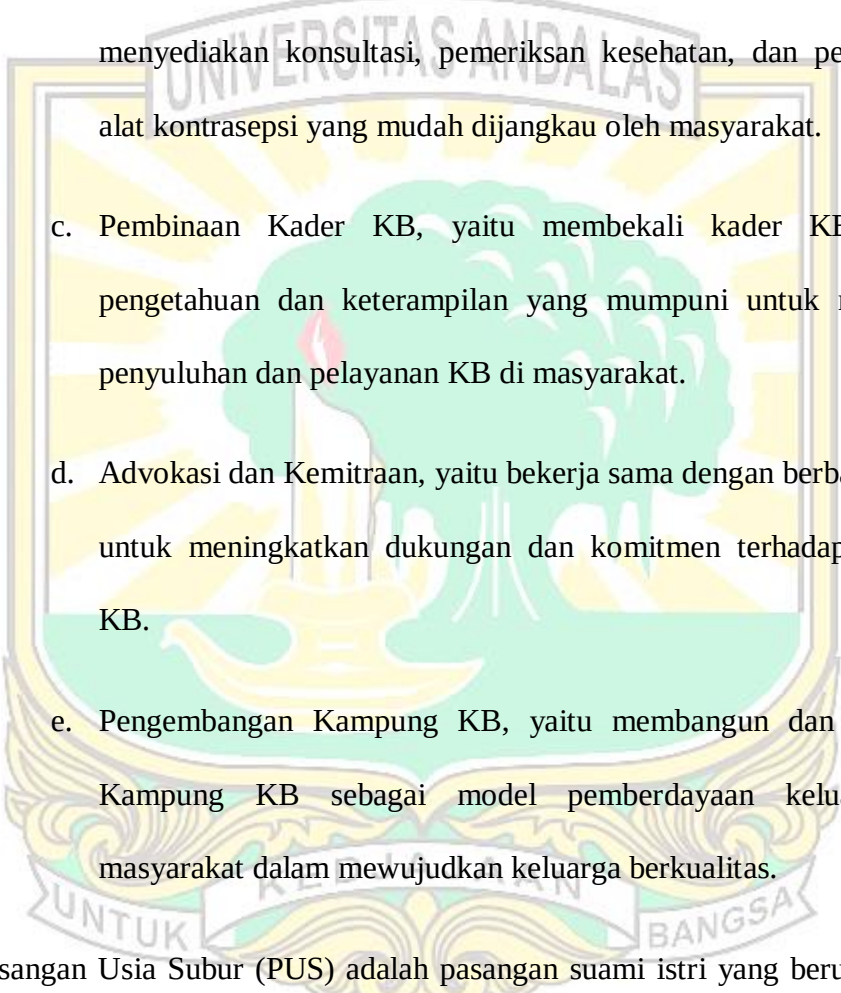
Wawancara diatas menjelaskan jumlah angka kelahiran penduduk Kecamatan Ranah Pesisir tahun 2022 mencapai 420 jiwa sedangkan ditahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 475 jiwa. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini cenderung meningkat. Peningkatan ini juga menjadi indikator penting untuk program KB dalam menekan angka kelahiran, serta perlunya strategi yang lebih tepat dalam mengjangkau Pasangan Usia Subur (PUS).

Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera serta untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan social budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Sasaran program Keluarga Berencana (KB) dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi yang berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan

pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai tujuan keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program keluarga berencana ditingkat kecamatan. Balai ini berfungsi sebagai pusat kegiatan operasional yang meliputi penyuluhan, pemberian informasi dan layanan kontrasepsi kepada masyarakat. Sebagai pelaksana utama di wilayah kecamatan, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana bertugas menerapkan kebijakan ke dalam langkah-langkah nyata sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga Balai Penyuluhan Keluarga Berencana ini penting untuk memastikan implementasi program Keluarga Berencana berjalan dengan efektif.

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir memiliki target group yang luas untuk program Keluarga Berencana (KB). Target utamanya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) termasuk yang ingin menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan atau menghentikannya. Remaja, pria, dan Kelompok Masyarakat Tertentu (KMT) seperti masyarakat prasejahtera, terpencil, dengan budaya berbeda atau berkebutuhan khusus juga menjadi targetnya. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir menjalankan berbagai program Keluarga Berencana (KB) seperti:

- 
- a. Penyuluhan dan edukasi tentang Keluarga Berencana, yaitu memberikan pengetahuan yang tepat dan komprehensif tentang manfaat KB, jenis metode dan efek sampingnya kepada masyarakat.
 - b. Pelayanan KB yang mudah diakses dan berkualitas, yaitu menyediakan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemasangan alat kontrasepsi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
 - c. Pembinaan Kader KB, yaitu membekali kader KB dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk membantu penyuluhan dan pelayanan KB di masyarakat.
 - d. Advokasi dan Kemitraan, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dukungan dan komitmen terhadap program KB.
 - e. Pengembangan Kampung KB, yaitu membangun dan membina Kampung KB sebagai model pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang berusia antara 15-49 tahun. Pasangan Usia Subur merupakan kelompok sasaran utama program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan kelompok penting dalam program Keluarga Berencana (KB).

Dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan akses terhadap layanan Keluarga Berencana (KB), Pasangan Usia Subur (PUS) dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan program Keluarga Berencana (KB) dan mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Berikut merupakan karakteristik Pasangan Usia subur, yaitu

- a. Usia istri antara 15-49 tahun,
- b. Pasangan yang sudah menikah,
- c. Pasangan yang tidak menikah tetapi sudah hidup bersama (kumpul kebo),
- d. Pasangan yang ingin menunda kehamilan,
- e. Pasangan yang ingin memiliki anak lagi.

Tabel 1. 2 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah PUS (jiwa)	
	2022	2023
Pelangai	298	354
Sungai Tunu	445	680
Sungai Tunu Utara	417	448
Sungai Tunu Barat	496	640
Nyiur Melambai Pelangai	604	625
Sungai Liku Pelangai	561	577

Koto VIII pelangai	520	555
Pelangai Gadang	387	512
Pelangai Kaciak	307	358
Pasia Pelangai	480	527
Total	4515	5276

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir.

Kenaikan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di tahun 2023 di bandingkan tahun sebelumnya dapat membawa beberapa dampak penting bagi program Keluarga Berencana (KB) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap layanan KB, seperti penyediaan alat kontrasepsi dan konsultasi kesehatan reproduksi untuk memastikan bahwa setiap pasangan memiliki akses yang memadai. Kenaikan ini bisa menjadi peluang untuk memperluas kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 1. 3 Jumlah Peserta KB Aktif Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah Peserta KB Aktif (jiwa)	
	2022	2023
Pelangai	197	245
Sungai Tunu	320	563
Sungai Tunu Utara	283	303
Sungai Tunu Barat	336	490

Nyiur Melambai Pelangai	426	450
Sungai Liku Pelangai	357	410
Koto VIII pelangai	301	345
Pelangai Gadang	244	382
Pelangai Kaciak	171	238
Pasia Pelangai	314	354
Total	2949	3780

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) dan membangun masa depan yang lebih sejahtera. Berbagai factor kemungkinan berkontribusi pada peningkatan minat KB di Ranah Pesisir, seperti gencarnya sosialisasi dan edukasi, akses layanan KB yang semakin mudah, perubahan pola pikir masyarakat dan dukungan dari tokoh masyarakat. Dampak positif dari peningkatan minat KB ini antara lain penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan kesehatan reproduksi perempuan, peningkatan kualitas hidup keluarga dan pembangunan masa depan yang lebih sejahtera. Meskipun terdapat peningkatan minat KB, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti memastikan akses layanan KB yang berkelanjutan.

Tabel 1.4 Struktur Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

No.	Jabatan	Tugas
1.	Kepala Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ranah Pesisir	Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan terkait program KB di tingkat kecamatan
2.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Bertanggungjawab melakukan penyuluhan, pendataan, dan pengawasan pelaksanaan program KB di tingkat kecamatan
3.	Staf Administrasi	Bertanggungjawab untuk mendukung kegiatan administrasi, pengelolaan data dan dokumentasi terkait program KB
4.	Kader KB	Bertanggungjawab membantu dalam penyuluhan dan sosialisasi program KB di desa atau kelurahan
5.	Petugas Kesehatan	Bekerja sama dengan PLKB untuk memberikan layanan medis terkait KB, seperti pemasangan alat kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan struktur Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir yaitu Kepala Balai Penyuluhan KB memiliki peran sentral dalam mengelola dan mengarahkan program Keluarga Berencana (KB) ditingkat kecamatan. Sebagai pemimpin, ia bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait penyuluhan, layanan, dan pendampingan KB berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, koordinator juga bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. Ia mengelola anggaran yang diterima untuk kegiatan KB

dan memastikan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peruntukan. Secara keseluruhan, koordinator Balai Penyuluh KB berperan sebagai penggerak utama yang memastikan program KB berjalan efektif, sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatannya.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), sebagai sekretaris di Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan memegang peran penting dalam memajukan program Keluarga Berencana. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) aktif dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berperan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB), membantu dalam menyediakan alat kontrasepsi, melakukan pendataan dan pemantauan Pasangan Usia Subur (PUS), membina kader, serta bekerjasama dengan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di masyarakat. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan program Keluarga Berencana (KB) yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Staf Administrasi di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana berperan sebagai pendukung dalam pengelolaan serta pelaksanaan program keluarga berencana di tingkat kecamatan. Mereka bertanggungjawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data terkait kegiatan program termasuk informasi mengenai jumlah

peserta, pengguna alat kontrasepsi dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, staf administrasi juga menyusun dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting seperti laporan evaluasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan program KB ini. Staf administrasi ini juga menyusun laporan untuk disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait lainnya serta dapat terlibat dalam pengelolaan anggaran dan keuangan yang dialokasikan untuk program ini.

Kader KKBPK (Kader Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga) berperan penting dalam mendukung program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga (KKBPK). Mereka bertugas melakukan pendataan dan pemetaan wilayah, mengadakan pertemuan rutin, memberikan edukasi dan layanan konseling serta fasilitasi akses terhadap layanan yang berkaitan dengan kependudukan, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Selain itu, mereka juga terlibat aktif dalam pembinaan keluarga melalui berbagai kelompok kegiatan, pengembangan program, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan Keluarga Berencana. Dalam hal ini, para Kader Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga (KKBPK) juga secara langsung menangani kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA).

Petugas Kesehatan, seperti bidan dan perawat memiliki peran penting dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) dengan menyediakan layanan medis dan bekerja sama dengan penyuluh KB. Mereka melakukan pemasangan alat

kontrasepsi seperti IUD dan Implan serta memberikan suntikan KB sambil memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan aman dan sesuai protokol medis. Selain itu, petugas kesehatan memberikan konseling mendalam mengenai berbagai metode kontrasepsi, termasuk manfaat, resiko, dan efek samping untuk membantu pasien membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Petugas kesehatan juga memantau dan mengevaluasi penggunaan alat kontrasepsi untuk memastikan efektivitas dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, memastikan bahwa program KB berjalan secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Tabel 1. 5 Jumlah Pembantu dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari (PPKBN) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah Pembina Keluarga Berencana (jiwa)	
	PPKBK	Sub PPKBK
Pelangai	1	5
Sungai Tunu	1	5
Sungai Tunu Utara	1	3
Sungai Tunu Barat	1	4
Nyiur Melambai Pelangai	1	5
Sungai Liku Pelangai	1	3
Koto VIII Pelangai	1	5
Pelangai Gadang	1	3

Pelangai Kaciak	1	2
Pasia Pelangai	1	7
Jumlah	10	42

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Jumlah Pembantu dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir, Pembina ini bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana di tingkat desa/nagari. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) di seluruh kelurahan adalah 10 orang, sedangkan jumlah Sub PPKBK adalah 42 orang. Hal ini memberikan gambaran mengenai sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Ranah Pesisir, serta menunjukkan distribusi tenaga Pembina dan Pembantu di berbagai Kelurahan.

Tabel 1. 6 Kegiatan yang dilakukan terhadap program Keluarga Berencana pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

No.	Kegiatan	Sumberdana	Implementor
1.	Bina Keluarga Balita (BKB)	APBD	Kader KKBPK dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir
2.	Bina Keluarga Remaja (BKR)	APBD	Kader KKBPK dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir
3.	Bina Keluarga Lansia	APBD	Kader KKBPK dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana

	(BKL)		Kecamatan Ranah Pesisir
4.	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	APBD	Kader KKBPK dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir
5.	Sosialisasi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	APBD	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

1) Bina Keluarga Balita (BKB)

Kehadiran program Keluarga Berencana dalam Bina Keluarga Balita (BKB) pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir membawa dampak yang baik bagi kesehatan masyarakat, khususnya balita dan keluarga. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya posyandu, imunisasi, gizi anak, dan pemberian vitamin. Mereka juga mampu mengidentifikasi tanda-tanda bahaya kesehatan balita dan mencari pertolongan medis yang tepat. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan balita. Bina Keluarga Balita (BKB) ini dilakukan 10 kali dalam setahun, kegiatan ini dilakukan di masing-masing posyandu yang ada di setiap nagari.

Tabel 1. 7 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah Kader BKB (jiwa)		Jumlah Keluarga (jiwa)				Persentase (%)	
			Sasaran BKB		Anggota BKB			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pelangai	0	0	127	101	0	0	0%	0%
Sungai Tunu	16	16	182	148	11	11	16,5%	13,4%
Sungai Tunu Utara	0	4	160	121	12	12	13,3%	10,8%
Sungai Tunu Barat	5	5	215	174	11	11	19,5%	15,8%
Nyiur Melambai Pelangai	8	8	264	204	10	10	26,4%	20,4%
Sungai Liku Pelangai	26	26	265	216	27	27	9,8%	8%
Koto VIII Pel	8	8	203	164	11	11	18,4%	14,9%
Pelangai Gadang	5	5	146	127	16	16	9,1%	7,9%
Pelangai Kaciak	24	24	136	113	20	20	6,8%	5,6%
Pasia Pelangai	0	4	239	191	12	12	19,9%	15,9%
Jumlah Total	92	100	1937	1559	130	130	14,9%	11,9%

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan situasi dimana jumlah kader, sasaran, dan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing kelurahan, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah sasaran dan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB). Keterbatasan anggaran dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan jangkauan program tersebut. Kader memiliki peran dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada keluarga terkait perawatan dan pengasuhan balita. Namun, dengan anggaran yang terbatas, pelatihan dan pengembangan kapasitas kader sering kali terabaikan yang dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan. Pernyataan tersebut di benarkan oleh wawancara dengan salah satu Kader Keluarga Berencana.

“Sebagai kader Keluarga Berencana kami menerima gaji sebesar Rp. 75.000/orang setiap bulannya yang diberikan oleh nagari. Meskipun jumlah gaji ini sama disetiap nagari, pembayarannya kadang lancar setiap bulan tapi lebih sering diberikan sekali tiga bulan.”
(Wawancara dengan salah satu kader KB Kecamatan Ranah Pesisir)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa kader Keluarga Berencana menerima gaji tiap bulannya dengan nominal yang sama disetiap nagari. Namun, pembayaran gaji seringkali tidak konsisten dimana kadang diberikan secara tepat waktu dan kadang mengalami keterlambatan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh langsung pada jumlah keluarga dan balita yang dapat dijangkau. Hal ini berarti bahwa program Bina Keluarga Balita (BKB) tidak dapat menjangkau semua keluarga yang membutuhkan dukungan, menghambat potensi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan balita di komunitas tersebut. Pada kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi penyuluhan dan edukasi kepada orang tua tentang pengasuhan anak, diskusi kelompok mengenai tantangan pengasuhan, pemantauan tumbuh kembang

balita serta layanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Semua kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial balita secara optimal.

Secara teoritis keberhasilan implementasi sebuah kebijakan atau program menurut Van Meter dan Van Horn salah satunya tergantung pada bagaimana kejelasan Standar dan sasaran Kebijakan atau program tersebut. Meskipun program KB pada Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ranah Pesisir memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas, tetapi yang terjadi dilapangan masih menghadapi kendala terutama dalam mencapai sasaran anggota KB. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah minimnya kapasitas kader yang menyebabkan jumlah sasaran dan anggota program KB tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, para kader juga kurang memiliki pemahaman yang memadai terhadap informasi yang disampaikan selama sosialisasi. Akibatnya, penyuluhan yang diberikan tidak optimal, partisipasi masyarakat rendah, dan target program tidak tercapai. Kader memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana, kurangnya informasi yang disampaikan oleh kader dapat menghambat keberhasilan program Keluarga Berencana.

2) Bina Keluarga Remaja

Kelompok Bina Keluarga Remaja ini merupakan suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja untuk memantapkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok.

Tabel 1. 8 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok Pada Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2023

Nagari	Jumlah Kader BKR (jiwa)		Jumlah Keluarga (jiwa)				Persentase (%)	
			Sasaran BKR		Anggota BKR			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pelangai	0	0	371	384	0	0	0%	0%
Sungai Tunu	6	6	478	504	0	0	0%	0%
Sungai Tunu Utara	0	0	411	424	0	0	0%	0%
Sungai Tunu Barat	2	2	501	513	0	0	0%	0%
Nyiur Melambai Pelangai	3	3	642	661	0	0	0%	0%
Sungai Liku Pelangai	0	0	578	591	0	0	0%	0%
Koto VIII Pelangai	0	0	593	595	0	0	0%	0%
Pelangai Gadang	0	0	430	447	0	0	0%	0%
Pelangai Kaciak	0	0	338	343	0	0	0%	0%
Pasia Pelangai	0	0	477	496	0	0	0%	0%
Jumlah Total	11	11	4819	4960	0	0	0%	0%

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah kader, sasaran, dan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) belum mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan ketiadaan anggaran dari masing-masing kelurahan yang seharusnya dialokasikan

untuk mendukung kegiatan kader. Ketiadaan anggaran yang dialokasikan oleh kelurahan untuk program Bina Keluarga Remaja (BKR) berdampak penting terhadap efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Kader tersebut bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan, memberikan bimbingan, dan membangun hubungan dengan para remaja. Sosialisasi dalam program Bina Keluarga Remaja (BKR) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terutama orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam perkembangan remaja. Dalam kegiatan ini, orang tua diajak untuk lebih memahami cara mendidik remaja dengan penuh kasih sayang tetapi tetap tegas serta pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Edukasi tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu fokus utama agar remaja memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada masa pubertas dan cara menghindari resiko seperti pernikahan dini dan seks bebas. Hal ini bertujuan untuk mencegah remaja terjerumus dalam pergaulan tidak sehat dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Bina Keluarga Remaja ini dilakukan 10 kali dalam setahun di sekolah atau madrasah, terutama untuk penyuluhan dan diskusi yang melibatkan para siswa dan orang tua. Hal ini dikarenakan sekolah menjadi tempat strategis untuk menjangkau remaja secara langsung.

3) Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia (BKL) hadir sebagai solusi strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberdayakan

keluarga dalam merawat dan mengasuh lansia dengan penuh kasih sayang dan kompetensi serta mendorong lansia agar tetap aktif, mandiri, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Tabel 1. 9 Jumlah Kader pada Bina Keluarga Lansia (BKL) Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah Kader BKL (jiwa)		Jumlah Keluarga (jiwa)				Persentase (%)	
			Sasaran BKL		Anggota BKL			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pelangai	0	0	30	30	0	0	0%	0%
Sungai Tunu	6	6	20	15	11	9	1,8%	1,6%
Sungai Tunu Utara	0	3	50	25	0	10	0%	2,5%
Sungai Tunu Barat	6	6	50	50	5	5	10%	10%
Nyiur Melambai Pel	3	3	35	35	15	15	2,3%	2,3%
Sungai Liku Pelangai	12	12	50	35	10	12	5%	2,9%
Koto VIII Pelangai	0	0	45	45	0	0	0%	0%
Pelangai Gadang	0	0	30	25	0	0	0%	0%
Pelangai Kaciak	0	0	25	20	0	0	0%	0%
Pasia Pelangai	0	0	15	15	0	0	0%	0%
Jumlah Total	27	30	350	295	41	51	8,5 %	5,7%

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Program Bina Keluarga Lansia (BKL) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia melalui berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, tabel di atas

menunjukkan bahwa jumlah kader Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tersedia masih cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan populasi lansia yang semakin meningkat. Penyebab utama dari kurangnya kader adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing kelurahan. Kegiatan ini mencakup penyuluhan kesehatan yang memberikan edukasi kepada keluarga mengenai perawatan lansia, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental serta cara pencegahan dan penanganan masalah yang umum dialami lansia. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol untuk memantau kondisi kesehatan lansia. Hal ini dapat membantu lansia dan keluarganya dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul seiring bertambahnya usia.

4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dirancang untuk mendukung keluarga akseptor KB dalam meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka. Tujuan Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) ini yaitu untuk (1) Meningkatkan pendapatan keluarga, UPPKA membekali keluarga dengan keterampilan dan sumberdaya untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri, sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan ketahanan keuangan mereka. (2) Memberdayakan perempuan, program ini berfokus pada pemberdayaan perempuan khususnya ibu-ibu akseptor KB dengan memberikan

pelatihan, pendampingan, dan akses ke layanan keuangan sehingga mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan kegiatan ekonomi. (3) Mendorong Pembangunan Komunitas, bertujuan untuk mendorong pembangunan komunitas dengan mendorong kolaborasi dan berbagai pengetahuan antar peserta yang mengarah pada penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan didalam komunitas.

Tabel 1. 10 Jumlah Kader dan Anggota Kelompok pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Tahun 2022-2023

Nagari	Jumlah Kader UPPKA (jiwa)		Jumlah Anggota Kelompok UPPKA (jiwa)		Persentase (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pelangai	0	0	0	0	0%	0%
Sungai Tunu	3	3	0	0	0%	0%
Sungai Tunu Utara	0	0	0	0	0%	0%
Sungai Tunu Barat	2	2	0	0	0%	0%
Nyiur Melambai Pelangai	3	3	0	0	0%	0%
Sungai Liku Pelangai	6	6	0	0	0%	0%
Koto VIII Pelangai	3	3	0	0	0%	0%
Pelangai Gadang	0	0	0	0	0%	0%
Pelangai Kaciak	0	0	0	0	0%	0%
Pasia Pelangai	0	0	0	0	0%	0%
Jumlah Total	17	17	0	0	0%	0%

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum tersedia. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut belum terbentuk di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir. Ketidakadaan kelompok ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya untuk membentuk dan mengelola kelompok tersebut. Pembentukan kelompok ini sangat penting dilakukan, karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga akseptor melalui kegiatan ekonomi produktif. Tanpa adanya kelompok ini, peluang untuk memberdayakan keluarga akseptor melalui peningkatan pendapatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada didalamnya salah satunya sumber daya manusia. Di Kecamatan Ranah Pesisir ini, kendala utama dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) adalah kurangnya kompetensi dan jumlah kader yang memadai. Akibatnya, program Keluarga Berencana (KB) tidak berjalan optimal dan berdampak pada rendahnya cakupan peserta. Minimnya sumber daya manusia yang kompeten serta keterbatasan anggaran menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Ranah Pesisir ini.

“Program Keluarga Berencana (KB) ini masih terkendala oleh jumlah kader yang terbatas, sehingga pencapaian sasaran program ini belum optimal dilaksanakan.”
(Wawancara dengan PLKB Kecamatan Ranah Pesisir).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah kader dalam program ini menyebabkan penyebaran informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai program Keluarga Berencana (KB) menjadi kurang maksimal. Akibatnya, kader yang ada belum mendapat menjangkau seluruh sasaran dengan efektif.

5) Sosialisasi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

Sosialisasi metode kontrasepsi jangka panjang adalah langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan MKJP di kalangan masyarakat Indonesia. MKJP menawarkan berbagai manfaat bagi individu, pasangan, dan keluarga seperti efektivitas tinggi, jangka panjang, kenyamana, dan manfaat kesehatan. Target sosialisasi ini meliputi Pasangan Usia Subur (PUS), Remaja, Petugas kesehatan, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui metode seperti penyuluhan, media massa, kampanye media, dan layanan konsultasi. Sosialisasi MKJP di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan pilihan kontrasepsi yang efektif dalam jangka panjang. Melalui kegiatan ini, petugas kesehatan dan penyuluh KB memberikan penjelasan tentang metode MKJP yang tersedia, seperti IUD (spiral), implan, sterilisasi. IUD dan implan merupakan alat kontrasepsi yang memiliki durasi penggunaan mulai dari 3-10 tahun, sedangkan sterilisasi adalah metode permanen. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan lebih sadar akan pentingnya merencanakan keluarga yang efektif.

**Tabel 1. 11 Alokasi Anggaran pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2023**

Kategori Pengeluaran	Deskriptif Kegiatan	Jumlah Unit	Biaya per Unit	Total Biaya
Biaya Operasional Balai Penyuluh KB	Biaya Transportasi yang dilakukan 10 kali dalam setahun	12 orang peserta penyuluhan (Kader)	Rp.50.000/orang	Rp. 6.000.000
	Biaya Konsumsi	12 orang peserta	Rp.30.800/orang	Rp. 3.696.000
	Honor Narasumber	1 OJP	Rp. 200.000	Rp. 2.000.000
Biaya Operasional Pengolahan Data	Biaya Konsumsi (untuk korlap KB dan PKB non ASN) dilakukan 4 kali dalam setahun	2 orang	Rp.30.800/orang	Rp. 246.400
Biaya Operasional Tenaga Lini Lapangan	Biaya Transportasi yang dilakukan 4 kali dalam setahun	16 orang peserta	Rp.50.000/orang	Rp. 3.200.000
	Biaya Konsumsi	16 orang peserta	Rp.30.800/orang	Rp. 1.971.200
	Honor Narasumber	1 OJP	Rp.200.000	Rp. 800.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Biaya Penggantian Transportasi/SPP D untuk PPKBD dan Sub PPKBD di wilayah kerja untuk	- PPKBD berjumlah 10 orang - Sub PPKBD berjumlah	Rp.50.000/orang	Rp. 4.210.000

	pemutkhiran data semester dan tahunan kelompok Keluarga Berencana yang dilakukan 2 kali dalam setahun	42 orang		
Jumlah Total	-	-	-	Rp.22.123.600

Sumber: RPJMD program Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan bahwa Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.123.600 yang digunakan untuk Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir pada tahun 2023, Program Keluarga Berencana pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendanaan ini disalurkan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang ada di kecamatan. Dengan adanya dukungan dari APBN, program KB di Kecamatan Ranah Pesisir ini dapat dijalankan dengan efektif dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga tujuan pembangunan nasional dalam bidang kependudukan dapat tercapai

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh Sumber daya salah satunya sumber daya non manusia (sumber daya finansial). Program penyuluhan yang seharusnya menjadi

wadah bagi para kader non-ASN untuk meningkatkan kapasitasnya, terkendala oleh keterbatasan anggaran. Alokasi dana insentif sebesar Rp. 50.000/orang untuk 12 peserta saja. Meskipun penyelenggaraan berupaya memberikan fasilitas makan siang, jumlah peserta yang jauh melebihi kuota membuat alokasi dana menjadi tidak merata dan tidak semua kader dapat mengikuti penyuluhan yang dilakukan di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir. Kondisi ini tidak hanya merugikan para kader yang tidak mendapatkan sumber daya finansial, tetapi juga dapat menurunkan motivasi dan semangat mereka dalam mengikuti program ini. Hal ini dinyatakan oleh salah satu kader di Kecamatan Ranah Pesisir yang menyatakan bahwa:

“setiap penyuluhan dilakukan, ada beberapa kader yang ikut penyuluhan. Itupun cuma satu perkelurahan yang ditunjuk untuk ikut penyuluhan yang diadakan di balai penyuluhan KB karna keterbatasan anggaran dari pemerintah.” (wawancara dengan salah satu kader Kecamatan Ranah Pesisir.)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap kegiatan penyuluhan yang dilakukan hanya diikuti oleh bebrapa kader. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah. Dengan demikian, walaupun kegiatan penyuluhan tetap berjalan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi kader dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga dampaknya terhadap program KB ini menjadi kurang optimal diwilayah tersebut.

Berikut data wilayah kerja yang diampu oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu:

Tabel 1. 12 Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir

No.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Kelurahan
1.	Defi Suryawati, A.Md.	Sungai Tunu, Sungai Tunu Barat, Sungai Tunu Utara, Pasia Pelangai, Nyiur Melambai Pelangai
2.	Erdawati	Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Kaciak. Pelangai Gadang, Sungai Liku Pelangai

Sumber: Wilayah Kerja PLKB Kecamatan Ranah Pesisir

Tabel diatas menjelaskan wilayah kerja PLKB Kecamatan Ranah Pesisir, wilayah ini mencakup berbagai kelurahan yang menjadi tanggung jawab PLKB dalam menjalankan program KB. Di setiap wilayah, PLKB bertugas memberikan penyuluhan, mengawasi pelaksanaan penyuluhan, mengawasi pelaksanaan program KB, serta membina kader yang berperan dalam mendukung keberhasilan program KB di masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah kader yang aktif dan mengikuti sosialisasi menjadi salah satu tantangan dalam mencapai target dan tujuan program KB secara optimal.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap para pelaksana dilapangan. Sikap tersebut mencerminkan disposisi atau kecenderungan implementor terhadap kesuksesan suatu program. Oleh karena itu, hal ini tentu dapat berdampak pada bagaimana para pelaksana bersikap

dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kurangnya sosialisasi yang diberikan kader terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota kelompok BKB yang menyatakan bahwa:

“Kendala dalam pelaksanaan program (KB) seringkali disebabkan kurangnya sosialisasi dari kader. Banyak diantara kami merasa bahwa sosialisasi oleh kader jarang dilakukan, dan ketika melakukan sosialisasi tidak menjangkau seluruh kelompok yang seharusnya menjadi bagian dari program KB ini.” (wawancara dengan salah satu anggota kelompok KB).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program KB di lapangan, terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi dari kader. Hal ini menunjukkan bahwa kader kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Sikap implementor yang seharusnya aktif dalam menyampaikan informasi justru terlihat kurang efektif dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Fenomena yang telah dijelaskan, terlihat masih banyak kendala yang menghambat optimalisasi program Keluarga Berencana sebagai upaya meningkatkan pembangunan keluarga dan sektor terkait untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Dari seluruh rangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Ranah Pesisir, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) ini. Berdasarkan data yang telah dikaji, terlihat bahwa jumlah partisipan program Keluarga Berencana (KB) tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara sasaran program dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Ranah Pesisir.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, baik dari aspek empiris maupun teoritis, peneliti menyadari pentingnya mempelajari Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Ranah Pesisir menggunakan teori yang dikembangkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Teori ini mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi efesiensi implementasi secara signifikan saling berinteraksi untuk mencapai efesiensi yang diinginkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dapat yang dirumuskan adalah Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Ranah Pesisir?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana program ini telah berjalan efektif dalam mencapai target yang diinginkan dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam konsentrasi Kebijakan Publik. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca terkhususnya mahasiswa Administrasi Publik lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya apabila ada penelitian yang menyangkut permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa kajian yang dapat digunakan khususnya Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Ranah Pesisir.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan semangat peneliti dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Keluarga Berencana.